

tidak ada istilah pengedar. Di situ yang ada hanya "menyerahkan", di mana konteks dan konotasinya sudah berbeda. "Contohnya begini, misalnya saya punya barang kemudian saya serahkan ke seseorang itu namanya menyerahkan. Berarti saya bukan pengedar. Nah kalau seseorang itu membeli barang dari saya itu disebut pengedar karena ada nilai profitnya. Itu bedanya menyerahkan dan pengedar," jelas Edi mencontohkan.

Contoh lainnya, dalam UU Narkotika, untuk membuktikan seseorang yang ditangkap terbukti memenuhi pasal-pasal ada perpanjangan waktu hingga tiga hari. Waktu tersebut dipergunakan untuk melakukan uji tes laboratorium. Berbeda dengan kasus kriminal lainnya dimana hanya memerlukan waktu satu hari untuk pembuktian. "Itulah yang terkadang membuat kita ini deg-degan menunggu hasil tes laboratorium," jelas Edi.

BEDA DENGAN KRIMINAL LAINNYA

Dalam upaya melakukan penahanan, juga tidak semudah seperti halnya di bidang Reskrim lainnya. Itulah yang harus dipahami oleh tersangka. Di Reskrim, misalnya seorang tersangka mengaku telah melakukan perbuatan kriminal dan ada saksi yang mendukung maka seseorang itu bisa langsung ditahan.

Sementara kalau di narkoba, berangkat dari barangnya dulu baru pada perbuatannya. Meskipun seseorang tertangkap sedang memakai, namun ketika tes urine ternyata tak mengandung narkoba, barang yang tersisa juga terbukti palsu setelah diuji laboratorium, maka seseorang tersebut tak bisa ditahan karena belum ada bukti yang mendukung.

Meski demikian tes urine tidak serta merta bisa dijadikan alat bukti yang sah seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak. Pembuktiannya harus ada

pada tes laboratorium yang kualifikasinya ada pada alat bukti berbentuk surat. Kalau alat bukti surat laboratorium sesuai dengan pengakuan seseorang bahwa dia memang menggunakan narkoba, jelas bisa langsung ditahan.

Juga sekalipun alat bukti surat tidak membuktikan seseorang memakai, namun seseorang itu dalam penyidikan memakai narkoba, juga bisa langsung ditahan. "Jadi meskipun tanpa alat bukti tapi dia mengaku yang kena," papar Edi. Sebaliknya kalau seseorang tidak mengaku namun menurut saksi ahli, lewat surat bukti laboratorium terbukti menggunakan, ya kena," imbuh Edi lagi.

SIDAK KAPOLDA

Alat bukti tes urine memang tak bisa dijadikan satu-satunya alat pembuktian, karena tanpa alat itu pun seseorang bisa terjerat pasal-pasal narkoba selama ada pengakuan. "Alat itu hanya untuk memudahkan kita," kata Edi seraya mengungkapkan bahwa Polda Jambi masih terus melakukan sidak bagi anggota Polda Jambi.

Ibarat menyapu maka menyapulah dengan sapu yang bersih. "Caranya ya dengan membersihkan anggota kita dulu. Dengan melakukan "pembersihan" ke dalam, maka masyarakat akan percaya terhadap kita," papar Edi.

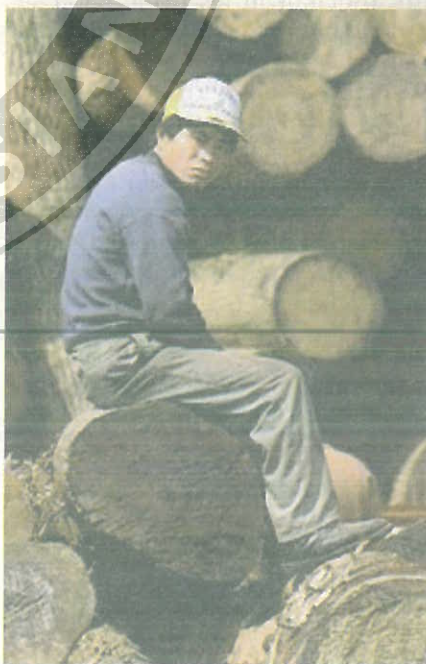
Dalam Sidak yang dipimpin langsung oleh kapolda, Polda Jambi berhasil menemukan sejumlah anggota yang positif menggunakan narkoba dan sekarang sedang dalam proses disidangkan ke pengadilan. Satu orang anggota berpangkat kompol dan 10 berpangkat bintara sudah dipecat dari anggota Polri, dan satu orang berpangkat AKBP sedang dalam proses. "Jadi di Polda Jambi ini tak ada ampun bagi siapapun termasuk anggota," tegas Edi. [bud]

Babat

Pemberantasan illegal logging tidak semudah menebang, menggergaji dan menjual kayunya. Tak cukup mengandalkan polisi, harus ada upaya pemberantasan mafia peradilan.

BUKAN menjadi rahasia lagi, kalau praktek mafia peradilan bisa meloloskan para tersangka seperti kasus illegal logging. Dalam proses hukum terkait pengungkapan kasus illegal logging, polisi hanya melakukan pengusutan terhadap barang bukti dan para tersangka yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Hal itu dikatakan Direktur Reserse Kriminal Polda Jambi, Kombes Pol Drs AR Allorante, bahwa kasus illegal logging agak tersendat-sendat, dikarenakan proses hukumannya. "Kita sudah capek-capek



Habis *Illegal Logging*

nangkap para pelaku, tapi vonis pengadilan itu sangat rendah. Malah ada yang dibebaskan," katanya.

Dijelaskan bahwa secara umum pemberantasan illegal logging di Jambi tidak ada masalah dan mendapat dukungan dari masyarakat. Walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak mendukung, dikarenakan mata pencariannya dari hasil penebangan liar. Jadi, kata Allorante, mulai Gubernur, muspida, LSM dan masyarakat, semuanya mendukung.

Pada saat ini, propinsi Jambi bisa dikatakan hampir tidak ada lagi illegal logging. Tidak ada kasus illegal logging yang tidak tuntas. "Selama saya di sini, kasus illegal logging seluruhnya kita tuntaskan," terang Allorante.

Diakui, bahwa pengalaman tugas selama dua kali di Jambi sangat mendukung tugasnya sebagai Dirreskrim yang sudah berjalan satu tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolresta Jambi, dan kasatserse Polres Bungo. Sehingga karakteristik masyarakat yang ada maupun penjahat, penebang liar dan cukong-cukong, sudah tidak asing lagi.

Terkait masalah illegal logging yang vonis hukumannya sangat rendah bahkan ada yang dibebaskan, Menurut Allorante hal itu memang ada, dan sempat mendapatkan protes baik dari masyarakat maupun LSM. "Ya.. begitulah, kalau saya lihat kadang LSM itu tidak murni menyuarakan aspirasi rakyat. Tidak murni sebagai control sosial, karena ada motif-motif lain," jelasnya.

Ternyata, kompleksitas permasalahan yang melingkupi illegal logging ini, tidak menyurutkan niatan Ditreskrim Polda Jambi untuk terus menggasak membat



habis siapa pun yang terlibat dalam illegal logging. Sehingga di propinsi Jambi tak ada lagi illegal logging.

Beberapa waktu lalu, kata Allorante, memang pernah ada beberapa kapolda dipanggil oleh Kapolri termasuk Kapolda Jambi, Riau, Kalti, Kalsel, dan Kapolda Kalbar, yang menegaskan bahwa akan ada operasi di lima daerah yang potensial terhadap illegal logging. Jadi, berawal dari itulah kita mulai gencar-gencarnya terhadap illegal logging yang ternyata mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah dan Mabes Polri.

"Sekarang, sudah beberapa kali dengar pendapat dengan komisi III DPR RI, alhamdulillah... dari Jambi tidak pernah diundang lagi," kata Allorante.

Resepnya apa?

Ya itu tadi, secara umum kita sudah kenal masyarakatnya. Bapak Kapolda turun langsung ke lapangan. Nah, dengan pengawasan yang sangat ketat dari pimpinan, akhirnya semua bisa dituntaskan. Dan kebetulan di sini punya dua armada helicopter. Sehingga dengan leluasa kita bisa memantau langsung ke taman-taman nasional yang ada di Jambi. [bud]